

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian W. Berder dkk, “*Kajian Sosio Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*”, Denpasar: Pustaka Larasan Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, dan Universitas Groningen.
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- _____, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bogdan Lancu, 2012, *Legislative Delegation: The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism*, Heidelberg: Springer.
- Bronwen Morgan dan Karen Yeung, 2007, *An Introduction to Law and Regulation*, London: Cambridge University Press.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black Law Dictionary: 7th Edition*, St. Paul, Minn: West Group.
- Cecil T. Carr, 1921, *Delegated Legislation*, London: Cabridge at the University Press.
- Charles Simabura, 2022, *Peraturan Menteri dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- DPR RI, 2019, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang*

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.

E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana.

HAS Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

_____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

_____, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

Lord Hewart of Bury, 1929, *The New Despotism*, London: Ernest Benn Limited.

Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*, Yogyakarta: Kanisius.

_____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (Buku 2)*, Yogyakarta: Kanisius.

_____, 2021, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi "Gesetzgebungswissenschaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-undangan"*, Depok: Badan Penerbit FH UI.

- MK RI, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm.
- Moh. Fadli, 2011, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press.
- MPR RI, 2017, “*Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia*,” Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- _____, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ruth Fox dan Joel Blackwell, 2014, *The Devil in the Detail: Parliament and Delegated Legislation*, London: Hansard Society.
- Saldi Isra, 2021, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2021, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Suratman dan Philip Dillah, 2012, *Metode penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422 /G/TF/2022/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

D. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ade Irawan Taufik, 2021, "*Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan,*" Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10, No. 2.

Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan dan Mario Ekoriano, 2020, "*Problematika "Delegated Legislation" Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,*" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 4.

Anthony D' Amato, 1983, "*Legal Uncertainty,*" California Law Review, Vol. 71, No. 1.

Bayu Dwi Anggono, 2018, "*Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya,*" Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1.

- Charles Simabura, 2021, “*Non-Delegation Doctrine of Presidential Legislative Power in The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia and In The United States of America*”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, No. 6.
- Delfina Gusman, 2011, “*Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40. No. 3.
- Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti, 2020, “*Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD)*,” *Acta Diurnal*, Vol. 4, No. 1.
- Edward L. Rubin, 1989, “*Law and Legislation in The Administrative State*”, *Columbia Law Review*, Vol. 89, No. 3.
- Enrico Borghetto, 2018, “*Delegated Decree Authority In a Parliamentary System: The Exercise of Legislative Delegation in Italy (1987–2013)*,” *The Journal of Legislative Studies*, Vol. 24, No. 2.
- Enrico Simanjuntak, 2018, “*Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1.
- _____, 2019, “*Restatement tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah*,” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2, No. 2.
- Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa’adah, 2021, “*Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara*,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- Fathorrahman, 2018, “*Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*,” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 2.
- Fitriani Ahlan Sjarif, 2017, “*Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan yang Menjalankan Delegasi dari Undang-Undang di Indonesia*,” *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- _____, 2023, “*Delegated Legislation Making Models in Indonesia within 1999-2012*,” *Pandecta*, Vol. 18, No. 1.

Gamal Abdul Nasir, 2017, "*Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*," Jurnal Hukum Replik, Vol. 5, No. 2.

Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori Perundang-undangan Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman," Makalah disampaikan pada saat upacara pengukuhan jabatan guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992.

Herman Pünder, 2009, "*Democratic Legitimation of Delegated Legislation: A Comparative View on The American, British and German Law*", International and Comparative Law Quarterly, Vol. 58.

Insan Tajali Nur, 2022, "Model Pengembangan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) Untuk Menciptakan Hierarki Perundang-undangan Berbasis Kerakyatan," Surakarta: Disertasi Doktor Universitas Sebelas Maret.

Laica Marzuki, 2017, "*Menyoal Diskresi yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*," Amanna Gappa, Vol. 25, No. 2.

Lovika Augusta Purwaningtyas, Bayu Dwi Anggono, dan A'an Efendi, 2023, "*Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang*," Interdisciplinary Journal on Law, Sosial Science and Humanities, Vol. 4, No. 1.

Lutfil Ansori, 2015, "*Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*," Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 1.

Maizathul Baizura, Emilda Firdaus, dan Mexsasai Indra, 2021, "*Penataan Pendelegasian Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah*," Riau Law Journal, Vol. 5, No. 2.

Mario Julyanto dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*," Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1.

- Mia Kusuma Fitriana, 2015, "*Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 2.
- Michael Taggart, 2005, "*From Parliamentary Power to Privatization: The Chequered History of Delegated Legislation in the Twentieth Century*", University of Toronto Law Journal, Vol. 55, No. 3.
- Moh. Gandara, 2020, "*Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*," Khazanah Hukum, Vol. 2, No. 3.
- Muh Nizar, Amiruddin, dan Lalu Subardi, 2019, "*Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2016)*," Jurnal Education and Development, Vol. 7, No. 1.
- Nadia Ayu Febriani, 2023, "*Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang oleh DPR RI Sebagai Siklus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*," Jakarta: Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Peter H. Aranson, Ernest Gellhorn, dan Glen O. Robinson, 1982, "*Theory of Legislative Delegation*", Cornell Law Review, Vol. 68, No. 1.
- Radita Ajie, 2016, "*Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2.
- Siska Windu Natalia dan Qurrata Ayuni, 2023, "*Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi di Dunia*," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 2.
- Sucidha Kurniasih, 2018, "*Urgensi Batas Waktu Penyusunan Peraturan Delegasi Undang-Undang*," Depok: Tesis Magister Universitas Indonesia.
- Sukarni dan Prajwalita Widiati, 2012, "*Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya*," Jurnal Yuridika, Vol. 27, No. 2.
- Vait Qerimi, 2015, "*Parliamentary Control Function*," European Academic Research, Vol. 3, No. 2.

Yuniar Kurniawaty, 2016, “*Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum,*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1.

Zaelani, 2012, “*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* *Jurnal Legislasi Indonesia,*” Vol. 9, No. 1.

Zainatul Ilmiyah, 2023, “*Rekonstruksi Konsep Tindakan Pemerintah dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan Onrechtsmatige Overheidsdaad,*” *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 2.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018, “*Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,*” *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1.

E. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., pada 14 Mei 2024, Jam 20.00 WIB, Dosen Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

F. Internet

Badan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “*Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU,*” <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-kajian>.

Deakin University, “*Delegated Legislation What is Delegated Legislation?*”, [https://deakin.libguides.com/c.php?g=558264&p=3839368#:~:text=Delegate%20\(or%20subordinate%20or%20subsidiary,has%20delegated%20law%2Dmaking%20authority](https://deakin.libguides.com/c.php?g=558264&p=3839368#:~:text=Delegate%20(or%20subordinate%20or%20subsidiary,has%20delegated%20law%2Dmaking%20authority).

Hario Mahar Mitendra, “*Fenomena Dalam Kekosongan Hukum,*” <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=258>.

Hukumonline, “*Menguji Efektifitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-fungsi-pemantauan-peninjauan-uu--perlu-sanksikah-lt607068ef4fafc?page=1>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, “*KBBI Dalam Jaringan,*” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, “*KBBI Dalam Jaringan,*” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prosedur>.

Kompas.com, “*Selain Cipta Kerja, Ini Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi,*” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat?page=all>.

LBH Jakarta, “*Siaran Pers: Menindaklanjuti Putusan PJ Kepala Daerah, LBH Jakarta Bersama Para Penggugat Layangkan Banding,*” <https://bantuanhukum.or.id/siaran-pers-menindaklanjuti-putusan-pj-kepala-daerah-lbh-jakarta-bersama-para-penggugat-layangkan-banding/>.

PSHK, “*Ketentuan Delegasi Peraturan Perundang-undangan,*” <https://pshk.or.id/aktivitas/ketentuan-delegasi-peraturan-perundang-undangan/>.

Yance Arizona, “*Apa Itu Kepastian Hukum?*”, <https://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

